

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Amin, 2013. *Netralitas Birokrat Pemerintahan pada Dinas Pendidikan Kota Makassar dalam Pemilukada di Kota Masakar* (Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2008).
- Fernandes , A., Mellaz , A., Riza , F., Siregar, F. E., Hurriyah, Raka Sandi, I. K., Wahyu, Y. (2019). *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Perihal Penyelenggaraan Kampanye*. Jalan MH.Thamrin No. 14 Jakarta Pusat: Badan Pengawas Pemilu.
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Patria, A, 2015. *Intervensi Politik dan Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014*.
- Ramadhani, M. M., Hartati, A., Jiwantara, F. A., Amane, A. P., Muharam, R. S., Bagenda, C., . . . Lopulalan, J. E. (2022). *PENGANTAR ILMU POLITIK*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Suryana, C. H., A, F., Amelia, F., B, F. R., Amalia, G., F, H. H., . . . Azhari, M. (2022). *Infrastruktur Politik Dalam Bingkai NKRI*. Bandung: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung
- Wiranata, I. G. A., & Yennie Agustin, M. R. (2018). *Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. Anugrah Utama Raharja (1st ed.). Anugrah Utama Raharja.
- Yamin, 2013. *Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Takalar*. Makasar.

### Jurnal

- Adnan, M. F., & Sarjayadi. (2023). Dinamika Netralitas Aparatur Sipil Negara di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora (Isora)*, 95 - 96.
- Barri, A. R. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Larangan Berpolitik Praktis Bagi Pemerintah Desa Pada Pemilihan Umum. *Jurnal Media Hukum*, 4-6.

- Darmawan, M. F. (2021). Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (Asn) Dalam Politik. *Varia Hukum*, 76-78.
- Fachri, M., Nanda, M. M., Marta, D. J., Elyasa, M. D., & Aprizal, C. (2023). Netralitas Aparatur Sipil Negara Menjelang Tahun Politik. *Jurnal Andragogi*, 77.
- Fayakun. (2022). Penerapan Hukum Terhadap Pelanggaran Aparatur Sipil Negara Di Kota Mojokerto Pada Pilkada Serentak Tahun 2018. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, 20.
- Furqon, E. (2020). Kedudukan Komisi Aparatur Sipil Negara Dalam Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Umum 2019 Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus Pada Pemilu 2019 Di Provinsi Banten). *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 21 - 23.
- Hartini, S. 2009. Penegakan Hukum Netralitas Pegawai Negeri Sipil (Pns). *Dinamika Hukum*. [Http://Dinamikahukum.Fh.Unsoed.Ac.Id/Index.Php/Jdh/Article/Download/237/201](http://Dinamikahukum.Fh.Unsoed.Ac.Id/Index.Php/Jdh/Article/Download/237/201).
- Herdiana, D. (2018). Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian Dan Konsep Dasar. *Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik*, 16.
- Irfan Darmawan, M. F. (2021). Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (Asn) Dalam Politik. *Varia Hukum*, 76-78.
- Junaid, A. R., Husen, L. O., & Gadjong, A. A. (2021). Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Bulukumba. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 1758-1761.
- Nambo, A., & Puluhuluwa, M. R. (2005). Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik (Suatu Telaah Dari Sistem Politik). *Jurna; Pendidikan Islam*, 265 - 266.
- Pradono, N. S. (2019). Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu 2019, Bisa Netralkah? *State Civil Apparatus In Election 2019, Can It Be Neutral? Jurnal Analis Kebijakan*, 49 - 50.
- Rahman, A., & Bakri, R. (2019). Penataan Pengelolaan Aparatur Sipil Negara (Asn) Melalui Dynamic Governance. *Jurnal Konstituen*, 2.
- Rahman, A. (2018). Konsep Dasar Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 46.
- Sumakul, T. W., Aguw, Y. O., & Wahongan, A. S. (2021). Kajian Yuridis Pelaksanaan Seleksi Terbuka Aparatur Sipil Negara Menurut

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. *Lex Administratum*, 6.

Wenur, A. K., Liando, D. M., & Sampe, S. (2020). Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Umum Legislatif 2019 Di Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 3.

Wibowo, A. P., Wardhana, E. W., & Nurgiansah, T. H. (2022). Pemilihan Umum Di Indonesia Dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Kewarganegaraan*, 3218-3220.

### **Skripsi**

Razi, Muhammad. (2021). Netralitas Aparatur Sipil Negara Di Kegiatan Berpolitik Pada Pasal 9 Uu No. 5 Tahun 2014 Ditinjau Menurut Perspektif *Fiqh Siyasah*, 25-26.

Sefiani, Lia. (2020). Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu 2019 Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Studi Kasus Wawancara Ustadz Abdul Somad dengan Prabowo Subianto), 1-4.

Sartika, Intan. (2021). Sikap Aparatur Sipil Negara Terhadap Hak Politik Dan Netralitas (Studi ASN Kecamatan Way halim dan Kecamatan Kemiling Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2020), 25-37.

Suyono. (2022). Kajian Literatur: Konsep Integritas Bagi Asn . Cendekia : *Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 247 - 253.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara.2011/No. 8, Tambahan Lembaran Negara No. 5189)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Lembaran Negara. 2012/ No. 117, Tambahan Lembaran Negara No.5316, Lembaran Lepas SETNEG : 149 HLM

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Lembaran Negara.2014/No. 6, Tambahan Lembaga Negara No. 5494

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara 2016/NO.130, Tambahan Lembaran Negara No.5898, Lembaran Lepas SETNEG : 70 HLM

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Lepas SETNEG : 317 HLM

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur. Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota

Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Anggota Partai Politik. Lembaran Negara. 1999 No. 11, Tambahan Lembaran Negara No. 3801, Lembaran Lepas SETNEG : 5 HLM

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN RB) Nomor B/71/M.SM.00.00/2017 tentang Pelaksanaan Netralitas bagi ASN dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018, Pileg 2019 dan Pilpres 2019.

### **Sumber Internet**

Redaksi, T. (2021, April 22). Politik Praktis: Pengertian dan Contohnya. Retrieved from [voi.id: https://voi.id/berita/46268/politik-praktis-pengertian-dan-contohnya](https://voi.id/berita/46268/politik-praktis-pengertian-dan-contohnya) diakses pada 12.49 WITA tanggal 14 Maret 2024.

Zakky. (2020, Februari 23). Pengertian Analisis Menurut Para Ahli dan Secara Umum [Lengkap]. Retrieved from [ZonaReferensi.com: https://www.zonareferensi.com/pengertian-analisis-menurut-para-ahli-dan-secara-umum/](https://www.zonareferensi.com/pengertian-analisis-menurut-para-ahli-dan-secara-umum/) diakses pada 13.50 WITA tanggal 13 Maret 2024.